

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa disebutkan: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di didesa sebagai upaya mengatasi kemiskinan, Pembangunan selama ini, lebih banyak di arahkan di kota, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian, berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi ini Desa dengan Masyarakat segala keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan besar di kota.

Disisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, dasar tidak terpenuhi infrastructure, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya, yaitu dengan merantau ke kota.

Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui pembangunan strategi desa yang tepat dan terintegrasi strategi. Fakta lain memperlihatkan eksploitasi sumber daya alam di desa secara besar-besaran, dengan tidak mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat, dengan alasan kemampuan rendah dari masyarakat setempat, lingkungan menyebabkan kerusakan, sosial baik fisik maupun. Kondisi lingkungan menjadi rusak, demikian juga terjadi transformasi kultur secara negative, sebagai akibat masuknya para pendatang baru yang menyebabkan strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam kebijakan berkelanjutan pembangunan yang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar, dan terencana. Pada prinsipnya pembangunan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

Aparatur Pemerintah terutama dalam pelaksanaan tugasnya belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang maksimal, Namun harus di sadari bahwa kemampuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, kualitas dari pada aparatur pemerintah itu sendiri, yang tentunya sangat mempengaruhi.

Kantor desa sering kita jumpai sistem kerja yang berdasarkan hirarki, memberikan konsep-konsep dalam penentuan pelaksanaan pembangunan, yang tentunya harus diejawatahkan oleh para staf yang dibawahnya, di mana pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa. Maka dapat dipastikan akan terjadi kekeliruan dalam menganalisa apa yang dimaksudkan oleh pimpinannya, apabila kemampuan dari staf yang ada masih dalam taraf yang rendah.

Demikian pula halnya dengan peranan dari seorang kepala desa sebagai pemerintah aparaturnya yang ada di desa, apabila tidak mampu untuk mengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang diambil oleh perangkat yang ada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pembangunan terlebih khusus pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang dipimpinnya.

Oleh karena itu peranan dari pemerintah desa sangat ditentukan kualitas sumber daya dari pemerintah yang tidak tanggap terhadap permasalahan yang ada di desa, akan menimbulkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan apalagi dalam pelaksanaan.

Mengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dicantumkan di atas, peningkatan peranan dari aparaturnya pemerintah maka untuk mewujudkannya diperlukan. Sangat dirasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Apalagi di era reformasi dewasa ini. Masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih khusus pemerintah desa di mana tingkat keahlian dan pendidikannya masih rendah dengan hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana Desa Saemba merupakan kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah yang ada, demi mencapai suatu pembangunan yang baik untuk negara kita, pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber daya manusia (SDM).

Permasalahan yang dihadapi Desa Saemba sekarang ini seperti masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perumusan pembangunan desa program, masih ada sarana dan prasarana pembangunan yang tidak disertakan dengan papan proyek dan

tidak terselesaikan tepat waktu dan hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang kurang harmonis sehingga berdampak pada pembangunan di desa, dan juga Badan Usaha Milik Desa ya ya hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang kurang harmonis sehingga berdampak pada Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

B. Rumusan Masalah Penelitian.

Adapun permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini, adalah;

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa Saemba dalam upaya peningkatan pembangunan di desa.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik dan bisa menambah wawasan bagi kalangan akademik.